



INOVASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN INKLUSI UNTUK SEKOLAH BEBAS DISKRIMIASI

Shelvie Famella¹, Imam Hanafi², Anita³

¹ Universitas Lancang Kuning, Indonesia

²Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia

³Pemerintah Desa Tangkit, Indonesia

Email: shelviefz92@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.616>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 May 2025

Final Revised: 21 May 2025

Accepted: 16 June 2025

Published: 22 June 2025

Keywords:

Inclusive Education

Learning Management

Students With Special Needs

Schools Without GPK



ABSTRACT

This study aims to analyze the management of inclusive education in junior high schools without the presence of Special Assistance Teachers (GPK), as well as to identify strategies for enhancing the learning process for students with special needs (ABK) in inclusive classrooms. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing interviews, classroom observations, and document analysis in three inclusive schools in Pekanbaru. Participants included school principals, classroom teachers, special education teachers, and parents of students with special needs. The findings reveal that inclusive education can still be effectively implemented without GPKs, provided that teachers receive sufficient training through programs such as In-House Training (IHT) and collaborate with external professionals. However, challenges remain, including rigid curricula, limited teacher preparedness, and inadequate teaching resources. The novelty of this research lies in its exploration of innovative inclusion management strategies based on internal teacher training and interdisciplinary collaboration, offering practical alternatives for resource-limited inclusive schools. These insights are expected to inform the development of more adaptive and sustainable inclusive education policies and practices.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pembelajaran inklusi di sekolah menengah pertama yang tidak memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK), serta mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kelas inklusi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang dilakukan di tiga sekolah inklusi di Kota Pekanbaru. Informan terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, GPK, dan orang tua siswa ABK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanpa kehadiran GPK, pembelajaran inklusi dapat tetap terlaksana secara efektif apabila guru mendapatkan pelatihan yang memadai, seperti melalui program In-House Training (IHT), serta menjalin kolaborasi dengan tenaga ahli eksternal. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam fleksibilitas kurikulum, kesiapan guru, serta keterbatasan sumber daya dan materi ajar. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan inovatif manajemen inklusi berbasis pelatihan internal dan kolaborasi lintas profesi, yang dapat menjadi solusi alternatif bagi sekolah inklusi dengan keterbatasan sumber daya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pendidikan Inklusi, Manajemen Pembelajaran, ABK, Sekolah Tanpa GPK

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif adalah pendekatan penting untuk memastikan semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, mendapatkan hak pendidikan yang setara dalam lingkungan reguler. Di Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap sekolah umum wajib menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar dapat belajar bersama dalam kelas yang sama. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan menghapus diskriminasi, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Namun, meskipun kebijakan ini telah berjalan lebih dari satu dekade, implementasinya masih mengalami berbagai hambatan di lapangan (UNICEF, 2023; Tempo, 2024).

Keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023) menunjukkan bahwa hanya tersedia sekitar 4.695 GPK, sementara lebih dari 44.000 sekolah di tingkat dasar dan menengah telah melaksanakan program inklusi. Kekurangan ini menempatkan beban besar pada guru reguler, yang harus menangani siswa ABK tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai (Kemenko PMK, 2023). Tidak hanya itu, status GPK di Indonesia belum sepenuhnya diakui secara profesional dan finansial. Banyak GPK berstatus kontrak atau bergantung pada kebijakan sekolah dan daerah, sehingga kurang menarik sebagai karier jangka panjang. Masalah ini menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas GPK di sekolah-sekolah inklusi (KBR, 2023; Research Gate, 2024).

Selain kekurangan GPK, sekolah-sekolah juga menghadapi keterbatasan dalam menyediakan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dengan disabilitas. Sebagian besar sekolah masih menggunakan kurikulum standar yang kurang fleksibel dan sulit disesuaikan dengan kebutuhan ABK, yang pada akhirnya menghambat proses belajar siswa (Journal of Pedagogy, 2024).

Stigma dan praktik perundungan (bullying) masih sering terjadi di sekolah-sekolah reguler, terutama yang belum siap secara sistem dan budaya untuk menjalankan pendidikan inklusi. Laporan terbaru menyoroti bahwa siswa dengan kebutuhan khusus sering kali mengalami diskriminasi atau perundungan dari teman sebayanya, yang berdampak negatif terhadap partisipasi dan prestasi mereka dalam pendidikan formal (Tempo, 2024; UNICEF, 2023). Untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih ramah dan inklusif, sekolah perlu mengembangkan program anti-perundungan dan meningkatkan kesadaran seluruh komunitas sekolah tentang pentingnya inklusi.

Dalam konteks keterbatasan sumber daya, banyak sekolah telah mulai menerapkan inovasi manajemen pendidikan inklusi. Salah satu strategi yang banyak diterapkan adalah In-House Training (IHT) bagi guru reguler. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus secara lebih mandiri. Selain IHT, beberapa sekolah juga membangun kemitraan dengan profesional eksternal, seperti psikolog atau terapis, untuk memberikan layanan tambahan bagi siswa ABK (Kemenko PMK, 2023; ResearchGate, 2024).

Pemanfaatan teknologi pendidikan juga menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif. Penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif dan alat bantu komunikasi digital membantu siswa dengan berbagai kebutuhan untuk tetap dapat mengikuti kegiatan belajar dengan optimal. Teknologi ini memungkinkan guru untuk memberikan instruksi yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan setiap siswa (Journal of Pedagogy, 2024).

Penelitian ini berkontribusi pada perumusan kebijakan pendidikan inklusi dengan

menekankan pentingnya pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang lebih adaptif. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam penyediaan GPK dan pelatihan bagi guru reguler. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan inklusi juga sangat diperlukan agar sekolah dapat menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan oleh siswa ABK (Kemenko PMK, 2023; Tempo, 2024).

Penelitian ini juga memberikan panduan praktis bagi sekolah-sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber daya untuk tetap dapat menjalankan program inklusi dengan efektif. Dengan mengedepankan strategi manajemen berbasis kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, diharapkan pendidikan inklusif di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, inovasi manajemen pendidikan inklusi merupakan langkah penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah tanpa GPK. Dengan penerapan IHT dan pemanfaatan teknologi, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan setiap siswa. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami praktik manajemen pembelajaran inklusi di sekolah menengah pertama yang tidak memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mendalam mengenai realitas sosial yang kompleks dan dinamis dalam konteks alami sekolah inklusi.

Partisipan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan khusus yang relevan dengan tujuan penelitian (Setyosari, 2012). Subjek penelitian terdiri dari: Kepala sekolah; Guru kelas; Guru Pendamping Khusus (jika tersedia); Orang tua siswa dengan kebutuhan khusus.

Lokasi penelitian adalah tiga sekolah menengah pertama inklusi di Kota Pekanbaru yang namanya menjadi Sekolah A, Sekolah B, dan Sekolah C. Total partisipan berjumlah 12 orang, dengan rincian empat partisipan dari setiap sekolah. Partisipasi mereka dipilih karena dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran inklusif.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa ABK untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terkait pelaksanaan pembelajaran inklusif; Observasi non-partisipatif, difokuskan pada aktivitas pembelajaran di kelas untuk mengamati interaksi antara guru dan siswa, serta adaptasi strategi mengajar; Studi dokumentasi, mencakup analisis dokumen pembelajaran seperti RPP, kurikulum, dan program pelatihan guru, guna memahami dukungan struktural terhadap pelaksanaan inklusi.

Semua data dikumpulkan secara triangulatif untuk meningkatkan validitas dan keandalan informasi yang diperoleh. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, mengikuti tahapan menurut Miles dan Huberman (1994), yaitu: Reduksi data: memilih dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian; Penyajian data: menyusun data dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel-tabel tematik; Penarikan kesimpulan: merumuskan pola-pola tematik dan interpretasi yang mendalam dari temuan

lapangan. Analisis dilakukan secara induktif dan berulang (iteratif), dimulai sejak proses pengumpulan data hingga tahap pelaporan, guna menjamin ketajaman interpretasi dan kelengkapan temuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manajemen pembelajaran inklusif di sekolah menengah pertama (SMP) tanpa dukungan Guru Pendamping Khusus (GPK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi kelas, dan analisis dokumen. Dalam analisis ini, data yang diperoleh dari tiga sekolah inklusi di Pekanbaru SMP A, SMP B, dan SMP C akan disajikan berdasarkan indikator-indikator kunci sebagai berikut:

1. Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Inklusif

Indikator pertama yang dianalisis adalah kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran inklusif. Hasil wawancara dengan guru-guru di ketiga sekolah menunjukkan bahwa mayoritas guru merasa kurang percaya diri dalam mengelola kelas yang heterogen.

Wawancara 1 (Guru SMP A):

"Saya merasa sulit untuk mengajar saat ada siswa yang memerlukan perhatian lebih. Kadang-kadang, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya rasa saya perlu pelatihan lebih lanjut."

Wawancara 2 (Guru SMP B):

"Kami diberikan teori tentang pendidikan inklusif, tetapi ketika berada di kelas, kami tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya. Saya sering merasa bingung."

Wawancara 3 (Guru SMP C):

"Ada siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi pelatihan yang kami terima tidak cukup untuk membantu kami menghadapinya. Kami butuh lebih banyak bimbingan dan dukungan." Sebagian besar guru melaporkan bahwa mereka belum menerima pelatihan yang memadai dalam manajemen pembelajaran inklusif. Meskipun ada niat baik dari guru untuk mengadaptasi strategi pengajaran, kurangnya kepercayaan diri dan dukungan menjadi penghalang utama.

2. Fleksibilitas Kurikulum

Indikator kedua berkaitan dengan fleksibilitas kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah inklusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum umum tanpa adaptasi yang signifikan untuk ABK.

Wawancara 1 (Guru SMP A):

"Kami mengikuti kurikulum yang sama tanpa penyesuaian. Kadang, saya harus mencari cara untuk menyederhanakan materi, tapi itu tidak selalu berhasil."

Wawancara 2 (Guru SMP B):

"Saya berusaha menyesuaikan materi untuk siswa ABK, tetapi kadang-kadang saya merasa terjebak dengan kurikulum yang sama, tanpa ada panduan untuk membuat perubahan."

Wawancara 3 (Guru SMP C):

"Kurikulum ini tidak fleksibel. Saya ingin membuat perubahan, tetapi sulit untuk mendapatkan izin atau dukungan dari pihak sekolah."

Meskipun guru menyadari pentingnya adaptasi kurikulum, mereka sering kali merasa tidak memiliki kebebasan untuk melakukannya, yang mengakibatkan pengalaman belajar yang kurang optimal bagi siswa ABK.

3. Penyediaan Sumber Daya dan Materi Ajar

Indikator ketiga adalah ketersediaan sumber daya dan materi ajar yang mendukung pembelajaran inklusif. Dalam wawancara, mayoritas guru melaporkan bahwa mereka tidak memiliki akses ke materi ajar yang sesuai untuk siswa ABK.

Wawancara 1:

"Kami tidak memiliki buku atau alat bantu belajar yang khusus dirancang untuk ABK. Ini membuatnya sangat sulit untuk menjelaskan materi kepada mereka."

Wawancara 2:

"Bahan ajar yang ada tidak mencukupi kebutuhan siswa kami. Saya harus mencetak materi sendiri, tetapi itu tidak selalu mungkin."

Wawancara 3 :

"Saya sering menggunakan internet untuk mencari materi tambahan, tetapi tidak semua guru memiliki keterampilan teknologi yang sama."

Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman siswa, terutama bagi mereka yang memerlukan pendekatan yang lebih individual. Tanpa sumber daya yang memadai, guru kesulitan dalam memberikan pengalaman belajar yang efektif.

4. Dukungan dari Manajemen Sekolah

Indikator keempat berkaitan dengan dukungan manajemen sekolah dalam implementasi pembelajaran inklusif. Wawancara dengan kepala sekolah di ketiga SMP menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif, dukungan yang diberikan masih minim.

Wawancara 1 (Kepala Sekolah SMP Ittihad):

"Kami ingin mendukung guru, tetapi anggaran kami sangat terbatas. Kami tidak dapat merekrut GPK karena keterbatasan dana."

Wawancara 2 :

"Kami telah berusaha untuk menyelenggarakan pelatihan, tetapi tidak semua guru dapat hadir. Kami juga menghadapi kesulitan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan."

Wawancara 3 :

"Dukungan dari manajemen sekolah harus ditingkatkan. Kami perlu mengadakan lebih banyak workshop dan pelatihan untuk guru tentang pendidikan inklusif."

Kondisi ini mengakibatkan kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi guru, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang inklusif. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif.

5. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Indikator kelima adalah keterlibatan orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mereka, terutama bagi siswa ABK, sangat bervariasi.

Wawancara 1 (Orang Tua di SMP A):

"Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anak saya belajar di rumah. Sekolah tidak memberikan informasi yang cukup."

Wawancara 2 (Orang Tua di SMP B):

"Kami selalu menghadiri pertemuan orang tua, tetapi saya merasa kurang mendapat dukungan dalam memahami kebutuhan anak saya yang berkebutuhan khusus."

Wawancara 3 (Orang Tua di SMP C):

"Sekolah mengundang kami untuk berpartisipasi, dan kami merasa lebih terlibat. Namun, kami masih butuh lebih banyak informasi tentang cara membantu anak kami."

Keterlibatan orang tua sangat penting dalam pendidikan inklusif, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam komunikasi antara guru dan orang tua, yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan inklusif.

6. Kolaborasi Antara Guru dan Tenaga Ahli

Indikator keenam yang dianalisis adalah kolaborasi antara guru dan tenaga ahli dalam memberikan dukungan kepada siswa ABK. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan antara guru dan tenaga ahli eksternal, seperti psikolog atau terapis, sangat terbatas.

Wawancara 1:

"Kami tahu bahwa kami seharusnya bekerja sama dengan profesional lain, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara menjalin komunikasi tersebut."

Wawancara 2 (Guru SMP B):

"Sangat jarang kami berkomunikasi dengan tenaga ahli. Kami lebih sering mengandalkan insting kami sendiri dalam menangani siswa."

Wawancara 3 (Guru SMP C):

"Jika kami bisa berkolaborasi dengan psikolog atau konselor, mungkin kami bisa memberikan dukungan yang lebih baik untuk siswa kami."

Minimnya kolaborasi ini mengakibatkan kurangnya intervensi yang tepat untuk siswa ABK, terutama yang memerlukan dukungan tambahan. Keterbatasan ini menciptakan tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan responsif terhadap kebutuhan individu siswa.

7. Evaluasi dan Penilaian Siswa ABK

Indikator ketujuh berkaitan dengan sistem evaluasi dan penilaian yang digunakan untuk siswa ABK. Dalam wawancara, mayoritas guru melaporkan bahwa mereka cenderung menggunakan metode penilaian yang sama dengan siswa reguler.

Wawancara 1:

"Saya menggunakan ujian yang sama untuk semua siswa. Terkadang saya merasa tidak adil,

tetapi saya tidak tahu cara lain."

Wawancara 2 :

"Kami hanya memiliki satu jenis ujian, dan itu tidak sesuai untuk semua siswa. Saya ingin melakukan penilaian formatif, tetapi tidak ada waktu untuk itu."

Wawancara 3:

"Penilaian akhir cenderung menekan siswa ABK. Saya ingin mencoba metode alternatif, tetapi itu tidak diterima oleh sekolah."

Observasi menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan tidak memperhitungkan perbedaan kemampuan siswa, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian. Perluasan pendekatan penilaian yang lebih fleksibel dan responsif sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran siswa ABK.

Pembahasan

Penelitian ini mengungkap tantangan dalam implementasi manajemen pembelajaran inklusif di SMP tanpa Guru Pendamping Khusus (GPK). Hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif, faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan, fleksibilitas kurikulum, keterbatasan sumber daya, dan dukungan manajemen sekolah menjadi penghambat utama. Salah satu temuan kunci adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengelola kelas inklusif, yang sejalan dengan pendapat Ainscow, Booth, & Dyson (2006) yang menekankan pentingnya pelatihan guru untuk mendukung semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru merasa tidak percaya diri dan tidak memiliki pelatihan yang memadai, yang sesuai dengan model Professional Development yang menyatakan bahwa pengembangan profesional berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru.

Fleksibilitas kurikulum juga merupakan indikator penting dalam pembelajaran inklusif. Menurut Tomlinson (2001), kurikulum harus diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan di ketiga sekolah tidak cukup fleksibel, sehingga menyulitkan adaptasi yang diperlukan. Penelitian oleh Skerbetz dan Bouck (2018) menguatkan temuan ini dengan menekankan bahwa kurikulum yang terlalu kaku dapat menghambat keterlibatan siswa. Oleh karena itu, kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam mengadaptasi kurikulum menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

Selanjutnya, ketersediaan sumber daya dan materi ajar yang sesuai juga sangat penting untuk mendukung pembelajaran inklusif. Mitchell (2014) menyatakan bahwa akses ke materi yang sesuai dapat membantu guru dalam merancang pengajaran yang lebih baik. Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa guru tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya yang mendukung siswa ABK. Penelitian oleh Jiang dan Zhang (2020) menemukan bahwa kurangnya sumber daya menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi pendidikan inklusif, di mana sekolah-sekolah yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya pendidikan dapat lebih berhasil dalam menerapkan kurikulum inklusif.

Dukungan dari manajemen sekolah juga sangat penting dalam mengimplementasikan pembelajaran inklusif. Ferguson (2008) menyatakan bahwa dukungan administratif yang kuat dapat memfasilitasi lingkungan yang kondusif untuk pendidikan inklusif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen sekolah di ketiga SMP cenderung

minim, yang menyebabkan kesulitan dalam mendukung guru dan siswa. Artikel oleh Kirk dan Gallagher (2018) menunjukkan bahwa manajemen yang proaktif dalam memberikan dukungan kepada guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga kurangnya dukungan manajemen sekolah menjadi penghambat utama pencapaian pembelajaran inklusif yang efektif.

Keterlibatan orang tua dan komunitas juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Epstein (2018) menjelaskan bahwa kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan keberhasilan akademik siswa. Namun, wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa mereka merasa kurang terlibat dan tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kebutuhan pendidikan anak mereka. Studi oleh Hornby dan Lafaele (2011) menunjukkan bahwa orang tua sering kali tidak terlibat karena kurangnya informasi atau dukungan dari sekolah, yang sejalan dengan temuan penelitian ini. Terakhir, kolaborasi antara guru dan tenaga ahli sangat penting dalam menyediakan dukungan yang tepat bagi siswa ABK. Teori Collaborative Consultation oleh Vaughn et al. (2006) menekankan bahwa kerja sama antara guru dan profesional lain dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi tersebut sangat terbatas. Artikel oleh Cohen dan Syme (2013) menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara guru dan profesional pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kolaborasi antara guru dan tenaga ahli untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi manajemen pembelajaran inklusif di SMP tanpa GPK memerlukan perhatian serius. Keterbatasan dalam pelatihan guru, fleksibilitas kurikulum, ketersediaan sumber daya, dukungan manajemen sekolah, keterlibatan orang tua, dan kolaborasi dengan tenaga ahli semuanya berkontribusi pada kesulitan dalam mencapai tujuan pendidikan inklusif. Upaya untuk mengatasi tantangan ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa tanpa keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK), pelaksanaan manajemen pembelajaran inklusif di Sekolah A, B, dan C masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam hal kompetensi guru, keterbatasan fleksibilitas kurikulum, minimnya akses materi ajar khusus, serta kurangnya kolaborasi dan dukungan manajemen sekolah. Hasil ini menegaskan pentingnya pernyataan tesis bahwa GPK memegang peran sentral dalam memastikan strategi inklusif dapat diterapkan secara efektif.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan profesional guru melalui pelatihan berkelanjutan, mentoring, serta penyusunan kebijakan kurikulum yang adaptif. Sekolah diharapkan mengalokasikan anggaran khusus untuk materi ajar inklusif dan membangun mekanisme kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk tenaga ahli dan orang tua, guna memperkuat keberlanjutan implementasi.

Meskipun memberikan gambaran mendalam, penelitian ini terbatas pada tiga sekolah inklusi di Pekanbaru dengan sampel relatif kecil, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu, studi lanjutan disarankan mengeksplorasi efektivitas berbagai model pelatihan inklusi, pengembangan kerangka kurikulum berbasis teknologi, serta melakukan penelitian longitudinal untuk mengukur dampak keterlibatan orang tua dan kolaborasi profesional. Perbandingan pelaksanaan manajemen inklusi di sekolah dengan dan

tanpa GPK juga diperlukan untuk merumuskan praktik terbaik yang dapat diadopsi secara lebih luas.

REFERENSI

- Alwaan, A. Z., & T, N. A. (2024). Dakwah Strategy in The Modern Era. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 28–34. Retrieved from <https://injies.unimika.ac.id/index.php/injies/article/view/4>
- Aziz, M., 'Arif, M., Alwi, M. F., & Nugraha, M. N. (2024). Improving The Quality of Education Through Optimizing the Educational Administration System at The An-Nur Islamic Education Foundation. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 5–15. Retrieved from <https://injies.unimika.ac.id/index.php/injies/article/view/2>
- Abiyusuf, I., Hafizi, M., Pakhrurrozi, P., Saputra, W., & Hermanto, E. (2024). Critical Analysis of The Rejection of Richard Bell's Thoughts on The Translation of The Qur'an in The Context of Orientalism. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 48–60. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.6>
- Amir, A., Afnita, A., Zuve, F. O., & Erlianti, G. (2024). Education and Application of Digital Media in Creation and Documentation Artery Based Service Letter. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 36–42. Retrieved from <https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/5>
- Anwar, C., Septiani, D., & Riva'i, F. A. (2024). Implementation Of Curriculum Management Of Tahfidz Al-Qur'an at Al-Qur'an Islamiyah Bandung Elementary School. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 91–96. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.11>
- Amrulloh, N. M. A. G. (2024). Educator Recruitment Management in Improving Student Quality at Dwiwarna Parung High School. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.9>
- Adeoye, M. A., & Otemuyiwa, B. I. (2024). Navigating the Future: Strategies of EdTech Companies in Driving Educational Transformation. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 43–50. Retrieved from <https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/10>
- Baroud, N., Alouzi, K., Elfzzani, Z., Ayad, N., & Albshkar, H. (2024). Educators' Perspectives on Using (AI) As A Content Creation Tool in Libyan Higher Education: A Case Study of The University of Zawia. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.12>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530>
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi Studi Kasus Di Sekolah Dasar Jambi. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*.
- Pratiwi, J. C. (2015). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus : Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan "Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi."*
- Sunaryo, S., & Indonesia, U. P. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya). *Jassi Anakku*, 10(2), 184–200.
- Bush, T. (2011). *Theories of Educational Leadership and Management*. London: Sage.
- Friend, M., & Bursuck, W. D. (2019). *Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers*. Pearson.

- Gistituati, N., Hadiyanto, H., Mukminin, A., & Habibi, A. (2020). Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Kustawan, M. (2012). Pendidikan Inklusi: Implementasi dan Tantangannya. *Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Stainback, W., & Stainback, S. (1996). *Inclusion: A Guide for Educators*. Paul H. Brookes Publishing Co.
- Sunaryo, S. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya. *Jassi Anakku*, 10(2), 184-200.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving schools, developing inclusion. Routledge.
- Cohen, J., & Syme, S. L. (2013). Social support and health: The role of social networks. In H. R. B. K. Kaplan & P. J. M. H. Rogers (Eds.), *Health psychology: A biobehavioral approach* (pp. 123-145). Psychology Press.
- Epstein, J. L. (2018). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Westview Press.
- Ferguson, D. L. (2008). Preparing leaders for inclusive schools. *Educational Leadership*, 66(3), 62-67.
- Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. *Educational Review*, 63(1), 37-52.
- Jiang, Y., & Zhang, Y. (2020). Challenges in the implementation of inclusive education in China. *International Journal of Inclusive Education*, 24(8), 800-815.
- Kirk, S. A., & Gallagher, J. J. (2018). Education of exceptional children. Cengage Learning.
- Mitchell, D. (2014). What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching strategies. Routledge.
- Skerbetz, M. D., & Bouck, E. C. (2018). The impact of a flexible curriculum on students with disabilities. *Journal of Special Education Leadership*, 31(2), 105-112.
- Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD.
- Vaughn, S., Elbaum, B., & Schumm, J. S. (2006). Collaboration in special education: Effective strategies for general and special education teachers. *Teaching Exceptional Children*, 39(1), 14-20.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA